



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 9 Januari 2025/Periodik - 2024)

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : NASA'I
2. Jabatan : PANITERA PENGGANTI
3. NHK : 441565

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 303.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/140 m2 di KAB / KOTA PASER, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 240 m2/37 m2 di KAB / KOTA PASER, HASIL SENDIRI Rp. 61.000.000
3. Tanah Seluas 400 m2 di KAB / KOTA PASER, HASIL SENDIRI Rp. 21.000.000
4. Tanah Seluas 240 m2 di KAB / KOTA PASER, HASIL SENDIRI Rp. 12.000.000
5. Tanah Seluas 250 m2 di KAB / KOTA PASER, HASIL SENDIRI Rp. 16.000.000
6. Tanah Seluas 78 m2 di KAB / KOTA KOTA SURABAYA , HASIL SENDIRI Rp. 45.000.000
7. Tanah Seluas 250 m2 di KAB / KOTA PASER, HASIL SENDIRI Rp. 17.000.000
8. Tanah Seluas 5100 m2 di KAB / KOTA PASER, HASIL SENDIRI Rp. 31.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 22.900.000

1. MOTOR, VESPA SEPEDA MOTOR Tahun 1987, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 1.200.000
2. MOTOR, SUZUKI SEPEDA MOTOR Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 14.700.000



3. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2014, HASIL SENDIRI
Rp. 7.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	7.500.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	688.687
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	334.088.687
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	334.088.687

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.